



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 132 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 132

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 132 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung



BUPATI BANDUNG PERATURAN



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025



KECAMATAN PANGALENGAN
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Seiring dengan perkembangan dan dinamika serta paradigma yang menuntut Institusi Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan disisi lain pula institusi Pemerintah termasuk Kantor Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien yang berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan, baik pelaksanaannya maupun terhadap kinerjanya yang menghasilkan output dan outcome yang mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Kecamatan.

Bahwa Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Pangalengan sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021-2026

Demikian Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada, dan dalam rangka penyempurnaan dalam penyusunan perencanaan , kritik dan saran serta masukan sangat kami butuhkan mengingat dalam penyusunan Kami sangat menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan, semoga Allah Swt memberikan Ridho dan lindunganNya, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Pangalengan, Juni 2025
Plt. Camat Pangalengan



VENA ANDRIAWAN S.STP,M.SI

Pembina

NIP. 198202152000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Hasil Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	28
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	52
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	57
3.3 Program Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB V PENUTUP	101
5.1	101
5.2.....	101
5.3.....	102

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Hasil Pengukuran Indikator Sasaran Strategis	10
TABEL 2.2 Realisasi Program Kegiatan Tahun 2024.....	11
TABEL TC 29.....	16
TABEL TC 30.....	31
TABEL TC 31.....	40
TABEL 3.1 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran.....	60
TABEL TC 32.....	61
TABEL TC.33.....	80
TABEL 4.1 Rencana Kerja Program Kegiatan Tahun 2025.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum, sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut Kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan Pelayanan Daerah Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan harus memiliki Perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Pangalengan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 telah memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang tercantum didalam Renstra dimaksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Bandung untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026.

Kecamatan Pangalengan sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian Daerah dengan Visi Kabupaten Bandung “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan Misi Nomor 4 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui

Birokrasi yang profesional, dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan,

Sebagai bagian dari Perencanaan, Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten.

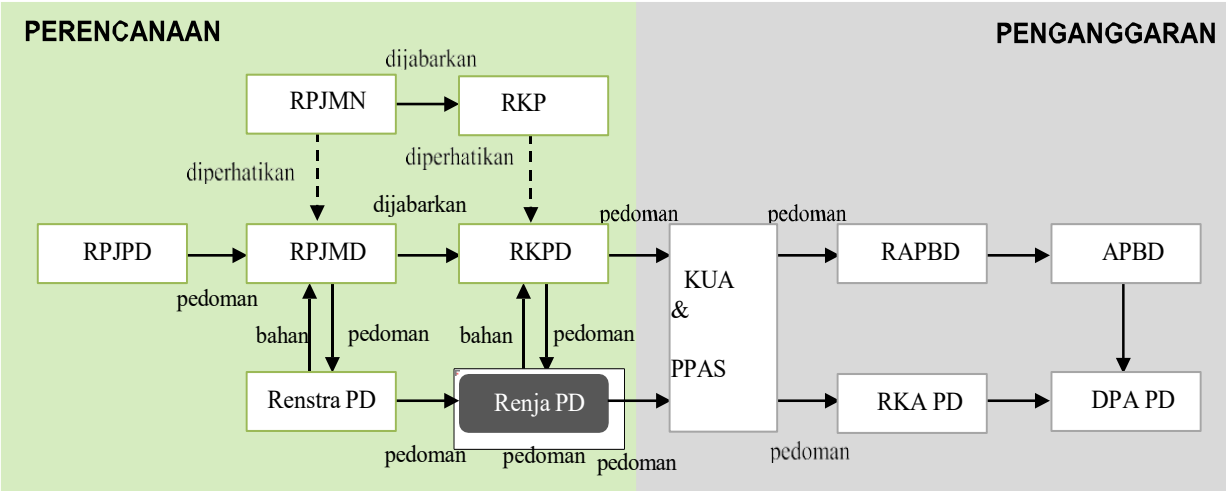
Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan diikuti Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769 -TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 16 Bidang Pelimpahan, 28 sub bidang Pelimpahan, dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan)

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai mengikuti Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Kecamatan Pangalengan sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 serta Perubahan Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025.\

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2025;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung nomor 15 tahun 2018);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 2023 Nomor 120);
30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 132 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan

Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 65);

33. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/20233 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah;
34. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DL.03.01/ 4382 / BAPPERIDA tentang Agenda Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung di tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangalengan Tahun 2025.

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Kecamatan Pangalengan, proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Kecamatan Pangalengan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pangalengan

2.4. Review Terhadap Renja Kerja RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangalengan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kerja Kecamatan Pangalengan

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Pangalengan Tahun Lalu

Kualitas penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Pangalengan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra dalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi. Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 dapat mencapai target secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3 Sasaran Strategis. Data capaian kinerja tahun 2024 terjadi pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Utama
Kecamatan Pangalengan Kabupaten
Bandung Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
1.	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	75.30	77.30	102,66
		2. Persentase BMD dalam Kondisi baik	%	96.00	97,73	101,35
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	Nilai	84.00	84,89	101,06

3.	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	2	2	100
Rata-rata capaian						105,07

(Sumber LKIP tahun 2024)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Pangalengan pada tahun 2024 mencapai 105,07 %, sedangkan untuk capaian realisasi program dan Kegiatan Kecamatan Pangalengan Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja Tahun 2024

No	Uraian Urusan/Bidang/Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6
	UNSUR KEWILAYAHAN	6,256,002,188	5,847,850,362		Menunjang
	KECAMATAN	6,256,002,188	5,847,850,362		Menunjang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,350,662,202	4,655,840,522	62.62	Menunjang
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54,627,000	46,675,000	60.63	Menunjang
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,650,000	5,610,000	66.26	Menunjang
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,500,000	5,440,000	68.61	Menunjang
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,500,000	5,440,000	68.61	Menunjang
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37,677,000	33,185,000	87.38	Menunjang
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,478,486,002	4,121,756,725	62.03	Menunjang
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,478,486,002	4,121,756,725	62.03	Menunjang
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,500,000	6,460,000	66.38	Menunjang
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,500,000	6,460,000	66.38	Menunjang
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46,366,000	46,267,000	66.76	Menunjang
1.4.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46,366,000	46,267,000	66.76	Menunjang
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138,763,604	137,838,222	66.31	Menunjang
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi	4,000,000	3,668,800	66.67	Menunjang

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,068,804	76,068,500	100	Menunjang
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000	4,664,400	66.86	Menunjang
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,816,522	12,816,522	100	Menunjang
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000	5,160,000	86.5	Menunjang
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,878,578	31,740,000	66.57	Menunjang
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430,340,148	411,604,870	65.72	Menunjang
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,060,148	42,407,430	74.32	Menunjang
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373,280,000	366,467,440	68.66	Menunjang
1.6.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162,846,148	178,638,705	62.76	Menunjang
1.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,000,000	34,056,085	72.46	Menunjang
1.7.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,346,148	15,268,250	66.66	Menunjang
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130,500,000	126,584,370	66.3	Menunjang
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	363,000,000	355,731,870	68	Menunjang
2.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	13,000,000	13,000,000	100	Menunjang
2.1.1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	13,000,000	13,000,000	100	Menunjang
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	350,000,000	342,731,870	67.62	Menunjang
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	350,000,000	342,731,870	67.62	Menunjang
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	256,500,000	254,115,000	66.07	Menunjang
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	158,000,000	157,675,000	66.68	Menunjang
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	158,000,000	157,675,000	66.68	Menunjang

	Masyarakat di Wilayah Kecamatan				
3.1.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	68,500,000	66,140,000	67.6	Menunjang
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	63,500,000	63,462,000	66.64	Menunjang
3.1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25,000,000	22,678,000	60.71	Menunjang
3.1.5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10,000,000	10,000,000	100	Menunjang
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57,115,000	57,006,000	66.81	Menunjang
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	51,605,000	51,566,000	66.63	Menunjang
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,655,000	6,650,000	66.62	Menunjang
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	44,650,000	44,616,000	66.63	Menunjang
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,510,000	5,440,000	68.73	Menunjang
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,510,000	5,440,000	68.73	Menunjang
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	106,674,686	106,647,000	66.67	Menunjang
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	106,674,686	106,647,000	66.67	Menunjang
5.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30,737,000	30,722,000	66.65	Menunjang
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	51,737,686	51,725,000	66.67	Menunjang
5.2.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24,500,000	24,500,000	100	Menunjang
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	121,450,000	118,207,000	67.33	Menunjang
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121,450,000	118,207,000	67.33	Menunjang
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	83,630,000	83,615,000	66.68	Menunjang

6.1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	37,520,000	34,262,000	61.4	Menunjang
-------	--	------------	------------	------	-----------

Dari tabel di atas Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun

dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat sub kegiatan yang tidak aada penyerapan namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada capaian Program dan Kegiatan tidak terdapat capaian yang melebihi dari target, karena realisasi sesuai dengan target yang perencanaan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor penyebab tidak tercapainya target dikarenakan dengan adanya beberapakali perubahan parsial anggaran sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan sehingga realisasi tidak tercapai sesuai yang ditargetkan. Sedangkan Untuk faktor penyebab Program/kegiatan terpenuhi realisasi kinerjanya dengan adanya faktor perencanaan yang tepat untuk program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pangalengan sehingga realisasi kinerja

sesuai dengan yang ditargetkan, juga dukungan dari semua pihak.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Capaian Kinerja di Kecamatan Pangalengan yang secara keseluruhan mencapai 90% tentu ada implikasi terhadap Renstra PD, sehingga menunjang terhadap capaian Indikator Kinerja.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

- a. Faktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya daya dukung sarana dan prasarana utility tidak berfungsi dengan optimal.
- b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
- c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 khususnya Kecamatan Pangalengan berupa perbandingan Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun Anggaran 2025 dengan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dari segi lokasi kegiatan, capaian target kinerja dan jumlah anggaran/dana. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara Rencana Kerja dengan RKA tahun yang sama, sehingga dapat dilakukan tidak lanjut berupa revisi pada penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya, bila terjadi ketidaksesuaian.

Evaluasi juga dilakukan terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 per triwulan. Adapun indikator target kinerja Perangkat Daerah (PD) mengacu kepada sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu Terselenggaranya Penatakelolaan Pemerintahan yang lebih baik melalui Peningkatan Kinerja Aparatur, dengan Penuh Dedikasi, Integritas, Kompeten, Pemenuhan, Formasi Pegawai, Akuntabel, Transparan, Menuju Pemerintahan yang Efektif dan Efisien. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung

Nama PD : Kecamatan Pangalengan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i> / Kegiatan <i>(output)</i>	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025					
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)			Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)=(7/6)	(9)		(10)		(11)=(5+7+10)		(12)=(11/4)	
	KECAMATAN PANGALENGAN																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7.01	KECAMATAN																		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik	67	point	68.50	Point	75,30	Point	77,30	Point	103%	78,10	Point	0,00	Point				

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	20	%	-		
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	laporan	6	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	11	dokumen	55%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	5	dokumen	50%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100%	2	dokumen	1	dokumen	5	dokumen	50%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50	dokumen	10	laporan	5	laporan	5	laporan	100%	5	laporan	1	laporan	16	laporan	32%

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	25	%		-	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	org	21	org/bln	21	org/bln	21	org/bln	100%	20	org/bln	20	org/bln	62	org/bln	59%
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%		-	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	0	laporan	2	laporan	200%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	10	%		-	

7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya</i>	22	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0%	22	Paket	0	Paket	0	Paket	0%
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	200	org	50	org	50	org	50	org	100%	50	org	10	org	110	org	55%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	29,72	%		-	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	5	paket	1	paket	1	paket	1	paket	100%	3	paket	0	paket	2	paket	40%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	20	paket	1	paket	4	paket	4	paket	100%	12	paket	1	paket	6	paket	30%

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	10	paket	1	paket	2	paket	2	paket	100%	12	paket	3	paket	6	paket	60%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	10	paket	1	paket	2	paket	2	paket	100%	5	paket	1	paket	4	paket	40%
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	5	dok	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	dokumen	3	paket	60%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	890	laporan	2	laporan	178	Laporan	178	Laporan	100%	12	Laporan	3	Laporan	183	Laporan	21%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	25	%		-	

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	4	laporan	0	laporan	0	laporan	0	laporan	0%	4	laporan	1	laporan	1	laporan	25%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	15	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	100%	12	laporan	3	laporan	9	laporan	60%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	40	laporan	1	laporan	8	laporan	8	laporan	100%	12	laporan	3	laporan	12	laporan	30%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	12,22	%		-	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	25	unit	5	unit	5	unit	5	unit	100%	5	unit	1	unit	11	unit	44%

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	30	unit	6	unit	6	unit	6	unit	100%	6	unit	1	unit	13	unit	43%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	10	Gedung	2	Gedung	2	Gedung	2	Gedung	100%	2	Gedung	0	Gedung	4	Gedung	40%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83.00	point	83.54	point	84,00	point	84,89	point	101%	85,00	point	0,00	point			
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%	200	%	200%
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	4	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	0	dokumen	2	dokumen	50%

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	25	%		-	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	60	laporan	6	Laporan	12	laporan	12	laporan	100%	4	laporan	1	laporan	19	laporan	32%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	20	%		-	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	20	%		-	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	4	laporan	0		1	laporan	1	laporan	100%	5	laporan	1	laporan	2	laporan	50%

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Prsentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%		-	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	lembaga	1	lembaga	1	lembaga	1	lembaga	100%	1	lembaga	0	lembaga	2	lembaga	40%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5	laporan	0		1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	0	laporan	1	laporan	20%
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5	laporan	0		1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	0	laporan	1	laporan	20%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase keluarga yang terfasilitasi	100	%	0	%	0	%	0	%	0%	100	%	0	%		-	

7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0	50	Keluarga	0	Keluarga	0	Keluarga	0%

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%		-	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%		-	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	0	laporan	2	laporan	40%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	5	laporan	1	laporan	1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	0	laporan	2	laporan	40%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0	%		-	

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>	5	laporan	0		1	laporan	1	laporan	100%	1	laporan	0	laporan	1	laporan	20%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	100	%		-	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	15	%		-	
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	250	org	200	org	50	org	50	org	100%	50	org	0	org	250	org	100%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>	800	org	250	orang	200	org	200	org	100%	50	org	10	org	460	org	58%

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	dokmen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	4	dokumen	1	dokumen	3	dokumen	60%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	20	%		-	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	50	%			
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	52	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	13	dokumen	100%	1	dokumen	0	dokumen	26	dokumen	50%
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100%	1	dokumen	1	dokumen	3	dokumen	60%

TC-29 merupakan tabel rekapitulasi hasil capaian perencanaan kerja dan pencapaian perencanaan strategis. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja telah mencapai target pada akhir periode renstra. Setelah dilakukan analisis pada penyusunan renstra perubahan, terdapat perubahan target capaian pada indikator sasaran strategis “Persentase Desa Beradministrasi Baik”. Hal ini dikarenakan indikator tersebut sudah tidak relevan untuk dijadikan indikator sasaran strategis.

Relevansi penetapan indikator sasaran strategis kaitan penyelenggaraan pemerintahan desa dinilai dari tugas dan fungsi Kecamatan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 221 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan pemetaan permasalahan yang dirumuskan pada perubahan rencana strategis Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026, pada pelaksanaan urusan peningkatan kualitas pemerintahan desa terdapat masalah pokok yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan yaitu belum optimalnya pengukuran keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi desa dari berbagai aspek. Untuk itu dibutuhkan indikator pengukur kinerja yang komprehensif terhadap ketiga tujuan pembentukan kecamatan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa. Maka ditetapkanlah Indikator “Jumlah Desa Cepat Berkembang” sebagai pengganti indikator “Persentase Desa Beradministrasi Baik”

Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dipilih sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Indikator tersebut merupakan alat ukur dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi yang dilakukan pada tiga bidang yaitu bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan. Dari pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang dapat dijadikan ukuran yang objektif dalam mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa di Kecamatan Pangalengan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan

kemampuan yang ada (potensi lokal). Disisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Kecamatan Pangalengan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari mulai proses sampai dengan tataran pelaksanaan/implementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun Kecamatan. Namun disisi lain sering berubah-ubahnya regulasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perencanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Perencana di tingkat SKPD mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pangalengan berdasarkan indikator yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangalengan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023 (n-2)	2024(n- 1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023 (n-2)	2024 (n- 1)	2025 (n)	2026 (n+1)	
1	Nilai AKIP			68,50 Poin	75,30 Point	78.10	79,00	75,30 Point	77,30 Point	78.10	79,00	Pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan, berdasarkan hasil evaluasi inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pangalengan Pencapaian nilai AKIP Kecamatan Pangalengan masih terdapat kekurangan untuk diperbaiki, seperti pada capaian pengukuran kinerja yang masih belum optimal.
2	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			64,10 %	96%	97,80 %	98,00 %	93,26 %	97,30 %	97,80 %	98,00 %	Terdapat beberapa permasalahan umum yang ditemukan pada pengelolaan BMD di Kecamatan Pangalengan yaitu 1. Penertiban aset agar prosedur penghapusan barang dalam kondisi rusak dapat ditempuh.2. Pendataan BMD secara keseluruhan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset Selain permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan belum dilakukannya penghapusan barang yang telah habis
3	Indek Kepuasan Masyarakat			83,10 Point	84,00 Point	85,00 Point	85,50 Point	83,54 point	84,89 Point	85,00 Point	85,50 Point	IKU Kecamatan Pangalengan Pada tahun 2024, Kecamatan Pangalengan memperoleh nilai IKM sebesar 84,89 poin,atau tercapai sebesar 100,01%. Meskipun capaian melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan seperti unsur sarana dan pra sarana, waktu pelayanan, serta tidak adanya kotak kritik dan saran untuk mewedahi keluhan masyarakat

4	Jumlah Desa Cepat Berkembang					2 Desa	2 Desa	-	-	2 Desa	2 Desa	IKU Kecamatan Pangalengan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap capaian persentase desa beradministrasi baik, sebagai upaya penyelarasan pengukuran kinerja, Kecamatan Pangalengan melakukan perubahan indikator "persentase desa beradministrasi baik" menjadi "jumlah desa cepat berkembang" pada perubahan rencana strategis tahun 2021-2026. Perubahan tersebut didasari dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026.
---	------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	--

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pangalengan dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Pangalengan sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, tugas pokok pada Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

Identifikasi masalah atau disebut juga dengan *Problem Identification* adalah suatu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah dengan kata lain identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang bisa dikatakan langkah paling penting diantara langkah-langkah proses yang lain. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tugas dan fungsi Kecamatan Pangalengan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Adapun indikator permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan sasaran Kecamatan Pangalengan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Akuntabilitas Kinerja	Masih Kurangnya sumber daya Manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk berdaya saing	Moratorium penerimaan CPNS/ belum meratanya penempatan PNS, terbatasnya diklat/bimtek peningkatan kapasitas pegawai

2.	Aset barang pemerintah	Penataan ruang pelayanan dan penataan ruangan gedung kantor, pagar kantor	Keterbatasan anggaran Kecamatan
3.	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Sarana prasarana pelayanan	Kebijakan Pemerintah, koordinasi internal dan tingkat sektoral

Pada tabel tersebut diatas, dapat kita lihat permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya jumlah tenaga jabatan pelaksana yang terlatih untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana pendukung yang mengarah pada kelancaran proses pemerintahan dan pelayanan masyarakat kurang memadai, salah satunya pelayanan langsung adminduk yaitu penataan ruang tunggu antrian pelayanan kecamatan dan kondisi bangunan gedung kantor kecamatan Pangalengan harus sudah di laksanakan pembangunan rehab.
3. Tujuan pelimpahan kewenangan belum seimbang dengan kondisi yang ada, terutama Sumber Daya Manusia.
4. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui forum Musrenbang Desa dan Kecamatan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bandung, khususnya terkait **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”** dengan tugas dan fungsi Kecamatan terdapat pada Misi ke 4 (Empat) yaitu **“Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”**

Tabel B- 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangalengan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”				
No.	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatkan kualitas Sumber Daya			
	Meningkatnya ketersediaan layanan 35asyarakat, 35asyaraka berkualitas dan partisipasi 35asyarakat dalam bidang 35asyarakat dan Kesehatan	Kurangnya tenaga pelaksana yang Profesional untuk mempermudah dan memparlancar pelayanan kepada 35asyarakat.	Masih kurangnya pendukung pengolah data/ informasi hasil penelitian	Adanya jaringan internet dan sarana prasaran penunjang operasional (PC 35asyarak/ laptop)
2	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing			
	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai optimalisasi	Belum adanya petugas secara khusus menangani bidangi dan memfasilitasi bidang perekonomian	Masih rendahnya motivasi terhadap peningkatan ekonomi mikro	Banyak sektor andalan yang bisa dijadikan faktor pendorong perekonomian
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah			

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”				
No.	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar yang tahan terhadap bencana serta mewujudkan keserasian pembangunan dengan tata ruang wilayah	Pemukiman padat penduduk mengancam ruang terbuka hijau menyempit. Kurangnya kepedulian 36asyarak 36asyarakat terhadap lingkungan	Sebagain besar wilayah kecamatan Pangalengan merupakan daerah rawan bencana	Kepedulian 36asyarak 36asyarakat dalam mendukung program pemerintah
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperharikan daya dukung lingkungan daya 36asyara lingkungan	Pendekatan/ sosialisasi belum terlaksana dengan baik	Cepatnya pembangun an fisik dan rendahnya kepedulian sebagian 36asyarakat terhadap lingkungan	Peraturan Daerah
5	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih			
	Meningkatkan kinerja Aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan 36asyar	Kurangnya SDM Kecamatan	Belum merata penempatan PNS dan kurangnya pemberdaya an pegawai	Pengadaan tambahan pegawai/karya wan, Peningkatan tunjangan pegawai dan penerapan system

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”				
No.	Misi dan Program KDH dan Wk. KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				capaian kinerja pegawai

Tabel B- 3.2
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan serta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Kurangnya petugas pelayanan yang 37asyarakat371 untuk menunjang pelayanan publik	Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan 37asyar serta terbatasnya rekrutmen pegawai/ petugas/ operator	Sebagain sarana prasaran pendukung telah tersedia baik 37asyarak maupun jaringan internet
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Masih kurangnya pemahaman 37asyarakat terhadap	Kurangnya sosialisasi penyelenggaraan program pemerintah	Fasilitasi dan sosialisasi kepada 37asyarakat terhadap

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Pangalengan	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pangalengan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penyelenggaraa n program pemerintah	kepada masyarakat	program dan perencanaan pembangunan
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Pangalengan	Masih rendahnya disiplin pegawai	a. Terbatasnya sumberdaya aparatur b. Belum optimalnya inventarisasi barang/asset	Optimalisasi sumberdaya yang ada serta tersusunnya pelaporan internal

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka maka ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan yang diuraikan pada BAB IV Dokumen Renja 2024

2.4 Review terhadap Renja RKPD

1. Perbandingan Renja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan Renja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Renja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.
Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Renja RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada.

Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

Renja RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal renja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KECAMATAN					KECAMATAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (AKIP)	76	4.437.665.408	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	75,80 Poin 93,75 %	4.955.578.682	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	40.802.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.550.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.550.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	9.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29.702.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	3.980.829.408	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22/12 bulan	3.980.829.408	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000,00	

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	1.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.292.760.266	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.292.760.266	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	100%	9.369.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	1.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	369.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	9.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	28.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	55.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	12.000.000,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	4.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	16.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	10.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal	100 %	124.388.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.388.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	338.100.148	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	60.148	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	385.151.985	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290.040.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	93.75	37.866.852	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	28.811.985	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	14.819.852	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	353.340.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	10.547.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	92 %	82.476.331	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangalengan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Gedung	12.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	55.000.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangalengan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84.10%	205.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangalengan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.500.000,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	5.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangalengan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84,10 Poin	427.178.586,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan	11.600.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	200.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	11.600.000,00	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	200.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	415.578.586,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangalengan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100%	175.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	415.578.586,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	75.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangalengan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	225.623.500,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	75.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	102.900.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)	Kec. Pangalengan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	100%	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	102.900.000,00	

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga kemasyarakatan	50.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibangun	1 Lembaga	68.900.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	23.900.000,00	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	25.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pangalengan	Persentase Keluarga yang terfasilitasi	100%	5.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	25.000.000,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	1.000.000	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pangalengan	Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi	100 %	54.023.500,00	
	Peningkatan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber	50 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	12.804.700,00	

			Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	1.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	10.304.700,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	1.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	10.304,700,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	1.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	10.304,700,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	75.000.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	10.304,700,00	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangalengan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	70.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	52.109.400,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	20.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	47.109.400,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	50.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	5.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	27.109.400,00	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 laporan	5.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	5.000.000,00	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	105.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	105.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	138.774.000	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	20.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	138.774.000	
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	77.625.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	35.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	30.149.000,00	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	90.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	31.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase desa yang dibina	100%	90.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	60.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	30.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina	100 %	60.000.000,00	
	Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	50.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	
						Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	
JUMLAH						5.087.665.408,00				5.979.287.213,00	

Reviu terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan proses untuk membandingkan antara program dan kegiatan pada rancangan awal RKPD dengan kebutuhan sumber daya untuk mengakomodasi upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Proses ini merupakan metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan menganalisis alasan-alasan perbedaan yang ditemukan.

Terdapat catatan-catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pangalengan tahun 2025 yaitu:

1. Terdapat penghapusan target kinerja maupun sumber daya anggaran pada sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. Target pada rencana strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana masa jabatan Kepala Desa terpilih selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan. Sesuai jadwal pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Pangalengan, tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak. Namun terdapat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun. Atas perubahan tersebut, subkegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak dilaksanakan.
2. Terdapat perbedaan pagu anggaran pada rancangan awal RKPD tahun 2025 dan hasil analisis kebutuhan. Perbedaan tersebut adalah hasil analisis kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi capaian program yang diharapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pangalengan tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RPJP Nasional 2005-2025, tidak lepas dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Pangalengani Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024. Sejalan dengan kebijakan pemerintah

Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Pangalengan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, baik dari segi administrasi kependudukan maupun mengkoordinasikan pelayanan bersifat umum diantaranya pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan ketertiban wilayah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 didasarkan kepada RPJP Nasional 2005-2025 yang tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Pangalengan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Renja Pembangunan Daerah Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Usulan program kegiatan yang diusulkan berdasarkan penelaahan berbagai aspek, yang dikerucutkan terhadap program kegiatan sesuai program prioritas Kecamatan diantaranya penunjang tata kelola internal (akuntabilitas), administrasi kependudukan, pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan ketertiban umum, olahraga pembinaan kepemudaan, wawasan kebangsaan dan stabilitas politik wilayah.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Bandung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pangalengan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Renja SKPD tahun 2024 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Pangalengan Tahun 2024 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja Awal juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Proses perencanaan yang transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di

dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target *Millennium Development Goal's* (MDG's)
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Pangalengan yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK sesuai dengan isu strategis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pangalengan adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan kegiatan setelah pagu indikatif RKPD Kabupaten ditetapkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pangalengan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, Berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 terdapat tantangan-tantangan dalam Pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”***.

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Lebih Bedas:** Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. **Maju:** Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
3. **Berkelanjutan:** Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, berikut adalah misi-misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
3. Meningkatkan Transparansi dalam Pelayanan Publik
4. Mengoptimalkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik

5. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan Pangalengan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat daerah telah merumuskan tujuan yang strategis sebagai arah kebijakan dalam pencapaian hasil dari pelaksanaan Program kegiatan. Dengan sasaran yang disinergikan dengan Tujuannya agar hasil yang dicapai dapat terukur

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa kecamatan akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masuk ke dalam Misi ke 3, yaitu : **“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”**.

Tujuan Kecamatan pangalengan untuk mencapai sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Sedangkan, Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pangalengan yaitu **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan**.

Tujuan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mencerminkan profesionalisme aparatur pemerintah kecamatan, tetapi juga menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pelayanan publik berarti memberikan layanan yang cepat, tepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan Pangalengan berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pengoptimalan manajemen data dan administrasi, hingga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar prosedur operasional tetapi juga mampu menjawab harapan masyarakat secara efektif dan efisien. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi sarana penting untuk memperkuat

partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, mendorong terciptanya iklim pemerintahan yang bersih, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangalengan secara menyeluruh dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Kecamatan Pangalengan yaitu, peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan menggunakan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran ini dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang komprehensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Dengan demikian, pengukuran indikator tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pangalengan pada periode tahun 2025-2029, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan Sasaran Kecamatan Pangalengan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju IKM	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	85.05	85.10	85.15	85.20	85.25	

Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya

**Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
KECAMATAN PANGALENGAN**

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator					Ket
				Outcome Ultimate		Immediate outcome	Output	Proses	
					Outcome Intermedite				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan					
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku	Prosentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		

1.1.1	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Tersusunya Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	Tersusunya Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

1.1.4	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Persentase Perencanaan Kinerja Periode Selanjutnya berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.2	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase Dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai Ketentuan		
1.2.1	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	

1.3	Terpenuhinya administrasi Barang milik Daerah	Terlaksanya Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Persentase Dokumen aPenataa Usahaan yang disusun sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1.3.1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terusunnya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
1.4	Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian	Tersusunya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja	Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran kinerja pada pengambilan keputusan terhadap total pengambilan keputusan	Persentase ASN Yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan		

1.4.1	Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai ketentuan		Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Per undang-undangan	
1.4.2	Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi SAKIP komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil Evaluasi Sakip sesuai Ketentuan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum sesuai Ketentuan		
1.4.3	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	

1.4.4	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.4.5	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Bahan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
1.4.6	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	

1.4.7	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan sesuai kebutuhan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
1.4.8	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang berlaku	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan sesuai Kebutuhan		

1.5.1	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.5.2	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedi	
1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec.Pangalengan	Nilai Evaluasi Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran kinerja yang dilaksanakan sesuai Ketentuan	Prosentase BMD dalam Kondisi Baik		

1.6.1	Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
1.6.2	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Persentase Penggunaan hasil pengukuran pada pengambilan keputusan terhadap total pengambilan keputusan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.6.3	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan					
2.1	Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang diselenggarakan sesuai dengan Ketentuan	Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
	Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

2.2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai Dengan ketentuan	Persentase urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.2.1	Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Jumlah laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan					

3.1	Teselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa Pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang dibina	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
3.1.1	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa	
3.2	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	

3.2.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	
3.2.2	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	
3.2.3	Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan					
4.1	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Persentase Penegakan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum		
4.1.1	Terciptanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

4.1.2	Terciptanya harmonisasi dengan tokoh- tokoh masyarakat	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masy	
4.2	Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan	Terciptanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang- undangan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Persentase Penegakan Perda dan Raperda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Pelaturan Kepala Daerah		
4.2.1	Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan					
5.1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan kepala Daerah terhadap jumlah Penugasan	Persentase Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap jumlah penugasan	Persentase Pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
5.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Pangalengan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					Jumlah Laporan yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

5.1.2	Terciptanya Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Pangalengan	Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					Jumlah laporan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	
5.1.3	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan					

6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan		
6.1.1	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	
6.1.2	Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung dengan 5 (lima) misi untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung Yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera”*** dengan gerakan **BEDAS** sebagai semangat bergotong royong menguatkan sinergitas instansi Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Misi Nomor 3 **Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.** telah menjadi kewajiban bagi OPD Kecamatan untuk melaksanakan Misi tersebut guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggara pelayanan publik, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program, kegiatan dan Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Pangalengan.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bupati Terpilih Kecamatan Pangalengan, dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 yaitu :

TABEL T.C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PANGALENGAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN BANDUNG

OPD : Kecamatan Pangalengan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)		Sumber Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Catatan Penting
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	78.10 Poin 97.80 %	4.993.638.213,00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	4.993.638.213,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	46.100.000,00		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.100.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.550.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.550.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.550.000,00		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.550.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	35.000.000,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.000.000,00	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000,00		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.000.000,00	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.303.451.213,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.303.451.213,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.303.451.213,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.303.451.213,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	1.500.000,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.500.000,00		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	28.500.000,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	28.500.000,00	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	12.000.000,00		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	16.500.000,00		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal	100 %	142.547.000,00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal	142.547.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.000.000,00		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.547.000,00		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	87.547.000,00	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000,00		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	389.040.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.040.000,00	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.040.000,00		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	338.040.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	92 %	82.500.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	82.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	55.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	55.000.000,00	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangalengan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.500.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangalengan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.500.000,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangalengan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84,10 Poin	475.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangalengan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	475.000.000,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan	15.000.000,00		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	15.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15.000.000,00		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	15.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	460.000.000,00		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	460.000.000,00	

2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	460.000.000,00		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	460.000.000,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangalengan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	234.500.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangalengan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	234.500.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	75.000.000,00		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	75.000.000,00		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	1 Lembaga	84.500.000,00		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	84.500.000,00	

3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	39.500.000,00		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39.500.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	20.000.000,00	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	25.000.000,00		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	25.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pangalengan	Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi	100 %	75.000.000,00		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pangalengan	Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi	75.000.000,00	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	17.000.000,00		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	17.000.000,00	

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	14.500.000,00		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14.500.000,00	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	14.500.000,00		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	14.500.000,00	
4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	14.500.000,00		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	14.500.000,00	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	14.500.000,00		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	14.500.000,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	75.000.000,00		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	75.000.000,00	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	70.000.000,00		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	70.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000,00		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	50.000.000,00		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000,00	
5	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	5.000.000,00		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	5.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000,00	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	141.149.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	141.149.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	141.149.000,00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	141.149.000,00	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	80.000.000,00		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80.000.000,00	
6	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	30.149.000,00		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.149.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	31.000.000,00		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	31.000.000,00	

6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	60.000.000,00		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina dan diawasi	60.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina	100 %	60.000.000,00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina	60.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50.000.000,00		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.000.000,00	
Jumlah					5.859.464.168					5.651.598.361	

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pangalengan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Renja program dan kegiatan Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Renja kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.3. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban.

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pangalengan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan serta pendanaan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun Anggaran tahun 2025

N O	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)		Sumber Dana
					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Pangalengan	Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik	75,80 Poin 93,75 %	4.993.638.213,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	46.100.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.550.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.550.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	35.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	2.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec. Pangalengan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.303.451.213,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	4.303.451.213,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	1.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	28.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	12.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	16.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal	100 %	142.547.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	87.547.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	5.000.000,00	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Pangalengan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	389.040.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.040.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	92 %	82.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	55.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Pangalengan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	12.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Pangalengan	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	84,10 Poin	475.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan	15.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	15.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	460.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	460.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Pangalengan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100 %	234.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	75.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	75.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	1 Lembaga	84.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	39.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	20.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	25.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pangalengan	Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi	100 %	75.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	17.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	14.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	14.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	14.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec. Pangalengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	14.500.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	75.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangalengan	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	70.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	50.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	5.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Pangalengan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Pangalengan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100 %	141.149.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Pangalengan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	141.149.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	80.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Pangalengan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	30.149.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	31.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	60.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Persentase desa yang dibina	100 %	60.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pangalengan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
	Jumlah					5.859.464.168	

Tahun 2025, Kecamatan Pangalengan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 5.859.464.168 yang memuat 6 program dalam mengusung misi visi Kabupaten Bandung. Program-program tersebut, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V

Penutup

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bandung 2005-2025, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Pangalengan tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan Seksi.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan

bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten.
4. Renja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra SKPD).
5. Renja Kecamatan Pangalengan Tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

Plt. CAMAT PANGALENGAN

ttd

VENA ANDRIAWAN

BUPATI BANDUNG

ttd

MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA